

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keberadaan data kebudayaan yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung pemajuan kebudayaan di tingkat daerah. Sistem Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) merupakan instrumen penting dalam mendokumentasikan objek pemajuan kebudayaan. Namun, di Kota Lhokseumawe, implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait minimnya data yang tersedia dalam sistem. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Dapobud berkontribusi terhadap pemajuan kebudayaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab masih terjadinya kekosongan data dalam sistem Dapobud. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek komunikasi, pelaksanaan Dapobud sudah cukup baik, karena adanya koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Namun, dalam aspek sumber daya dan disposisi, masih ditemukan berbagai hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan anggaran, dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan pendataan. Selain itu, minimnya pemahaman petugas terhadap sistem juga menjadi kendala tersendiri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kendala utama dalam implementasi Dapobud di Kota Lhokseumawe terletak pada kurangnya dukungan sumber daya, baik manusia maupun finansial, yang berdampak langsung terhadap lambatnya pemajuan kebudayaan. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan penguatan komitmen lintas sektor agar sistem ini dapat diimplementasikan secara optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD), Pemajuan Kebudayaan

ABSTRACT

This research is driven by the importance of accurate and integrated cultural data to support the advancement of culture at the regional level. The Basic Cultural Data System (Dapobud) plays a vital role in documenting cultural advancement objects. However, in Lhokseumawe City, the implementation of this system still encounters various obstacles, particularly regarding the lack of available data. The objective of this study is to analyze how the implementation of Dapobud contributes to cultural advancement and to identify the factors causing data absence in the system. This study employs a descriptive qualitative approach with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The theoretical framework used is Edward III's policy implementation theory, which includes aspects of communication, resources, and disposition. The research findings indicate that from the communication aspect, Dapobud implementation has been relatively effective, supported by coordination and outreach efforts from relevant institutions. However, in terms of resources and disposition, several challenges persist, such as the lack of competent human resources, limited funding, and inconsistent data collection efforts. Moreover, a lack of understanding among personnel regarding the system further complicates implementation. The study concludes that the primary barriers to Dapobud implementation in Lhokseumawe are the lack of resource support—both human and financial—which significantly hinders the progress of cultural advancement. There is a need for improved capacity building among personnel and stronger cross-sectoral commitment to ensure the system can be implemented optimally and sustainably.

Keywords: *Policy Implementation, Basic Data on Culture (DAPOBUD), Promotion of Culture*